



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



SKEPTISME PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP STANDAR AKUNTANSI

Sarwenda Biduri, Dinda Putri Kusuma Wardani, Sigit Hermawan, Wiwit Hariyanto

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.666 B, Sidoarjo 61215

Surel: sarwendahbiduri@yahoo.com

Volume 12
Nomor 2
Halaman 431-448
Malang, Agustus 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
16 November 2020
Tanggal Revisi:
23 Agustus 2021
Tanggal Diterima:
31 Agustus 2021

Kata kunci:

laporan keuangan,
pengetahuan akuntansi,
standar akuntansi,
usaha mikro

Mengutip ini sebagai:

Biduri, S., Wardani, D. P. K., Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2021). Skeptisme Pelaku Usaha Mikro terhadap Standar Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (2), 431-448. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.25>

Abstrak - Skeptisme Pelaku Usaha Mikro terhadap Standar Akuntansi

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya untuk mengetahui perilaku skeptisisme pelaku usaha mikro terhadap standar akuntansi.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan beberapa pihak pelaku usaha mikro, dosen, dan dinas koperasi menjadi informan utamanya.

Temuan Utama- Pelaku usaha mikro tidak mau membuat laporan keuangan untuk usahanya. Selain itu, mereka juga masih belum mengenal standar akuntansi khusus entitas mikro yang kemudian berakibat pada tercampurnya pembukuan operasional bisnis dan rumah tangga.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Pemerintah harus memosisikan diri sebagai pembina dan pendidik pelaku usaha mikro. Selain itu, pelatihan akuntansi menjadi urgensi bagi operasional bisnis mereka.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini mengangkat isu skeptisme pelaku usaha mikro dalam memahami standar akuntansi.

Abstract - Micro-Entrepreneurs Skepticism of Accounting Standards

Main Purpose - This study seeks to determine how the behavior of micro-entrepreneurs skepticism towards accounting standards.

Method - This study uses a qualitative descriptive method with several micro-entrepreneurs, lecturers, and the cooperative service become the primary informants.

Main Findings - Micro entrepreneurs do not want to make financial reports for their businesses. In addition, they are still not familiar with specific accounting standards for micro-entities. These things then resulted in the mixing of business and household operational books.

Theory and Practical Implications - The government must position itself as the coach and educator of micro-entrepreneurs. In addition, accounting training becomes an urgency for their business operations.

Novelty - This research raises the issue of skepticism of micro-entrepreneurs in understanding accounting standards.



UMKM memegang peranan penting dalam kontribusinya bagi perekonomian Indonesia. UMKM yang merupakan asosiasi dari berbagai entitas ekonomi Indonesia dengan tingkat yang relatif tinggi dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi (Liyu et al., 2017; Sari, 2013). Selain memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, UMKM juga menjadi pintu gerbang bagi para pencari kerja di era globalisasi saat ini, yang juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan adanya krisis global yang melanda, UMKM justru menjadi sektor yang stabil dan dapat menjadi solusi sistem perekonomian yang efektif. Dengan demikian, UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Coetzee & Buys, 2017; Laureano et al., 2016). Keunggulan UMKM selain kestabilannya adalah mampu memberikan solusi dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. UMKM juga merupakan solusi yang juga berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang terdapat di Indonesia.

Di balik kontribusi dan keunggulan UMKM yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, rupanya terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM. Rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimnya pengetahuan kewirausahaan dan kompetensi pengelola UMKM menyebabkan tingkat produktivitas usaha yang melemah dan biaya tenaga kerja yang dinilai rendah (Pradhan & Das, 2015; Ritchi et al., 2020). Hal ini juga terlihat dari masih belum memadainya UMKM dalam hal pengelolaan, khususnya pada aspek keuangan dan pencatatannya atau dokumentasi. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan aspek hukum. Mayoritas UMKM belum memiliki kejelasan badan umum dan legalitas usaha, khususnya terkait perizinan usaha. Padahal prosedur-prosedur tersebut wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan (Fera & Salzillo, 2021; Nassar et al., 2020). Minimnya inovasi produk juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi UMKM. Penggunaan dan pengaplikasian teknologi, manajemen, pemanfaatan informasi pasar merupakan keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pengelola UMKM. Selain itu, dalam upaya menjaga keberlanjutan, UMKM membutuhkan dana yang terbilang cukup besar. Hal tersebut menjadi kendala bagi UMKM,

sebab akses permodalan yang terbatas dan administrasinya pun kerap dipersulit.

Di antara beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, keterbatasan modal menjadi permasalahan utama (Abe et al., 2015; Williams & O'Donovan, 2015). Kalkhouran et al. (2015) dan Saeidi et al. (2018) menuturkan bahwa yang membantu pertumbuhan UMKM secara jelas adalah perbankan. Kendati telah banyak berdiri lembaga kredit khusus bagi pelaku usaha kecil atau BPR, sebagian pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil tidak mendapatkan informasi dan bantuan kredit bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya (Azudin & Mansor, 2018; Bautista-Mesa et al., 2019). Sebagaimana yang diketahui bahwa akuntansi merupakan instrumen bisnis yang mau tidak mau harus dipahami dan diimplementasikan oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM (Bartolini et al., 2014; Damak-Ayadi et al., 2020). Tanpa adanya akuntansi, suatu usaha seakan tidak memiliki haluan yang jelas, akankah usaha itu bisa dikatakan laba atau mengalami keuntungan atau malah justru sebaliknya dengan mengalami kerugian, atau bahkan tidak ada perkembangan yang signifikan dalam perkembangan usaha (Perera et al., 2020). Hal tersebut dapat memberikan indikasi bahwa UMKM tersebut mengalami deklinasi atau kebangkrutan. Samuelsson et al. (2016) menyatakan bahwa laporan akuntansi yaitu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas seharusnya menjadi laporan utama yang dikeluarkan oleh pihak UMKM. Investor akan kesulitan untuk menilai dan mempertimbangkan kinerja pelaku UMKM tanpa adanya laporan keuangan dari UMKM. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya proses akuntansi untuk mendapatkan akses kredit, baik dari pemerintah, perbankan, maupun kreditur.

Handley et al. (2018) berpendapat bahwa sumber dana menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan UMKM. Sebagai suatu entitas usaha yang ingin berkembang, UMKM sebelum mencari sumber pendanaan tambahan dalam usahanya, diperlukan pula informasi mengenai posisi keuangan agar dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan (Coram, 2018; Cultrera & Brédart, 2016). Padahal, ketika pendanaan dapat berjalan dengan lancar, UMKM bisa menjadi salah satu unsur dari pertumbuhan ekonomi dan tidak kalah dengan usaha yang lebih besar. Di Indonesia, SAK ETAP dijadikan sebagai standar dan

Tabel 1. Informan Kunci

Nama	Jabatan
Sundari	Pemilik UMKM
Sugeng	Pemilik UMKM
Amri	Pemilik UMKM
Nihlatul	Dosen Akuntansi
Mahfud	Pemerintah Daerah

acuan utama bagi UMKM dalam membuat laporan keuangan. Akan tetapi, tingkat implementasi standar tersebut masih dinilai rendah dan menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM. Rendahnya kualitas laporan keuangan berimpas pada rendahnya tingkat peminjaman atau pendanaan yang didapatkan oleh UMKM (Bauwhede et al., 2015; Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2021).

Fenomena rendahnya kualitas pelaporan keuangan UMKM terutama implementasi SAK ETAP dapat didasari dengan sikap keraguan atau skeptisme pelaku UMKM. Mengenai “skeptisisme” yang membuat para pelaku UMKM enggan melaksanakan suatu kegiatan akuntansi di dalam bisnisnya, yaitu pembuatan laporan keuangan yang berdampak pada hilangnya minat investor untuk membantu dalam penambahan modal (Armitage et al., 2016; Rickards & Ritsert, 2018; Sharma & An, 2018). Dengan demikian, penelitian ini akan mengungkap skeptisisme subjek UMKM yang menggunakan *time frame*. Subjek penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam dan valid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku skeptisisme pada UMKM terhadap laporan keuangan berikut dampaknya terhadap peningkatan minat investasi modal. Hasil ini diharapkan mampu menambah ilmu bagi peneliti dan pembaca terkait dengan praktik akuntansi pada UMKM. Serta diharapkan mampu memberikan wawasan terkait sikap skeptis pelaku UMKM yang dapat berpengaruh terhadap hambatan peningkatan minat investasi modal.

METODE

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui sikap skeptis pelaku UMKM sebagai penghambat peningkatan minat investasi modal. Area penelitian dikhususkan pada lima kawasan UMKM berbeda. Dengan de-

mikian, studi deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode.

Pada penelitian ini, uji keabsahan data diukur dengan menekankan terhadap empat aspek yang ada, yaitu aspek nilai kebenaran, nilai penerapan, nilai konsistensi, dan nilai netralitas. Uji keabsahan data yang dipakai pada penelitian kualitatif ini merupakan triangulasi, dengan melakukan pemeriksaan data dari cara dan waktu yang bervariasi.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Kemudian untuk meningkatkan derajat kepercayaan atau derajat akurasi data penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*).

Tabel 1 menunjukkan informan kunci dalam penelitian ini. Informan yang terpilih terdiri atas berbagai sumber. Hal ini merupakan bagian dari triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan berdasarkan perspektif setiap informan (pelaku UMKM, dinas koperasi, serta dosen akuntansi). Tahapan analisis data dalam penelitian ini menjadi tahapan yang paling sulit, sebab hasil dalam penelitian ini masih belum baku dan analisis data diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM di Indonesia bergerak pada berbagai bidang seperti jasa, perdagangan, industri, dan pertanian yang acap mempengaruhi kepentingan masyarakat (Arafat et al., 2020). Keberadaan pengembangan UMKM menjadi suatu solusi efektif untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan (Kaya & Koch, 2015; Qamruzzaman & Jianguo, 2019; Schans, 2015). Membuka usaha dapat menjadi pilihan yang tepat bagi seorang yang memiliki keahlian berlebih. Karena dengan keterbatasan pendidikan, mencari pekerjaan menjadi hal yang cukup sulit. Dengan demikian, membuka lapangan

pekerjaan sendiri merupakan cara terbaik yang nantinya dapat membantu mempekerjakan orang lain atau masyarakat yang belum beruntung (Fera & Salzillo, 2021; Nasar et al., 2020).

Pemerintah saat ini begitu memperhatikan dan melakukan pengembangan dan peningkatan usaha mikro untuk membantu para pelakunya. Jumlah usaha mikro, kecil, menengah bahkan besar semakin banyak. Baik yang tergabung dalam sebuah paguyuban koperasi pemerintah maupun tidak. Lebih lanjut, Mahmud menjelaskan keberadaan UMKM pada kutipan sebagai berikut:

“Jadi, UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah itu merupakan badan usaha milik individu yang dijalankan perorangan oleh pemilik usaha dengan kriteria tertentu yang melakukan suatu usaha dengan tujuan dapat menjadi penopang ekonomi dengan harapan terus berkembang misal yang usaha mikro jadi usaha kecil, yang kecil jadi menengah dan sejenisnya. Yang sudah memenuhi syarat kriteria usaha mikro di mana asetnya 50 juta dengan omset 300 juta, ketentuan itu sudah tertulis di undang-undang. Begitu pula usaha kecil di mana merupakan usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau badan usaha namun tidak sebagai anak cabang atau anak perusahaan yang dikuasai, adapun usaha menengah berbeda dengan mikro dan kecil, kalau menurut saya *sih* yang membedakan itu jumlah aset, omset bahkan mungkin jumlah pegawainya ya antara mikro, kecil, dan menengah. Kalau secara *itunya sih* sama sama usaha milik perorangan yang sesuai dengan undang-undang” (Mahfud).

UMKM berupa usaha perorangan atau badan usaha yang dikategorikan dari setiap kriterianya sesuai dengan jumlah aset dan omset serta termaktub dalam Undang-undang Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008. UMKM juga merupakan usaha produktif, yang dilaksanakan baik oleh perorangan maupun badan usaha yang memiliki ketentuan di setiap bagian (mikro, kecil, dan me-

nenengah). Kriteria tersebut umumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Narsa, 2017; Niswatin et al., 2017; Sari, 2013).

Terdapat kurang lebih ribuan usaha UMKM dengan berbagai bidang seperti makanan, barang, dan lain sebagainya, baik yang telah bergabung dengan paguyuban koperasi maupun yang berdiri sendiri. Pada saat ini yang menjadi sasaran pemerintah adalah untuk memberikan bantuan berupa fasilitas kredit pinjaman lunak melalui dinas koperasi kepada pelaku UMKM. Hal ini tergambar dari kegiatan yang telah digelar pemerintah. Pemerintah menggelar bazar dengan mengangkat UMKM untuk lebih memperkenalkan produknya. Kurang lebih ada puluhan stan yang telah dipersiapkan untuk para pelaku usaha tersebut, mulai dari makanan hingga berbagai produk misalnya tas, sepatu, baju dan lain sebagainya. Selain menghadirkan para pelaku UMKM, pemerintah juga bisa menghadirkan delegasi dari perbankan yang kemudian bisa membantu memfasilitasi para pelaku usaha dalam bidang keuangan. Sebenarnya secara jumlah, unit UMKM mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Karena memang dengan adanya pelaku UMKM dapat membantu kemakmuran masyarakat, seperti pemberdayaan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Dengan adanya peningkatan jumlah pelaku UMKM, lapangan pekerjaan pun semakin terbuka untuk dapat membantu mengurangi pengangguran. Tak hanya jumlah, variasi dari bentuk UMKM juga semakin meningkat dengan cukup pesat. Kendati demikian, pada pelaksanaannya masih belum diimbangi dengan SDM yang memadai dan pengetahuan yang mumpuni. Namun tetap saja, semakin berkembang dan canggihnya era digital dan globalisasi saat ini, semakin banyak pula masyarakat yang mencoba peruntungan melalui usaha, yang tentu saja membuat persaingan antarpebisnis menjadi lebih ketat.

Jika kita mampu bersaing dengan perkembangan jaman, maka usaha kita akan tetap berjalan, namun berlaku pula sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mahfud pada kutipan sebagai berikut:

“Pihak dinas Koperasi ini biasanya mengadakan pelatihan *entrepreneur* seperti yang dilakukan kapan

waktu itu, nah pelatihan-pelatihannya itu seperti contohnya saja foto produk. Kita harus memberikan kesan menarik pada produk yang akan kita promosikan, lalu ada lagi kegiatan tentang *packaging*, jadi menariknya bisa dibidang totalitas ya mulai dari produk sampai *packing* jadi dapat menarik minat konsumen. Jadi sebelum kita menuju ke legalitas para pelaku UMKM, upaya pertama kita adalah mengidentifikasi. Kita adakan perkumpulan untuk lebih mengenal profil usaha dan produk para pelaku UMKM. Akan menjadi kendala kalau kita saja belum tahu profil usaha mereka. Kita kan perlu mengetahui nama mereka, usaha apa yang mereka jalankan, produk apa yang dihasilkan, berkesinambungan usaha mereka” (Mahfud).

Keberadaan dinas koperasi cukup memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang pelaku usaha alami agar tidak tertinggal dari semakin cepatnya perkembangan usaha yang ada saat ini. Selain itu, dinas koperasi diharapkan dapat membantu para pemilik UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dari yang awalnya mikro bisa berkembang ke kecil dan dapat terus berkembang menjadi menengah. Pembinaan dan pelatihan seharusnya menjadi program rutin dinas koperasi dalam rangka memajukan pola pikir para pelaku UMKM (Cahyaningtyas & Ningtyas, 2020; Lindawati, 2014) .

Berbagai jenis usaha tentunya membutuhkan akuntansi, tak terkecuali bagi para pelaku UMKM yang ingin mendirikan sebuah usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha tersebut diharuskan untuk mengetahui dan mempelajari siklus akuntansi dengan maksud agar usahanya memiliki alur, supaya dalam mencatat data keuangannya dapat berjalan dengan sesuai dan lancar dan juga agar setiap alur dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku. Akan tetapi, permasalahan ini justru seringkali diabaikan oleh para pelaku UMKM yang menyebabkan memperburuk kinerja manajemen bagi para pelaku UMKM tersebut. Sebagian dari mereka tidak

menjadikan manajemen akuntansi sebagai fokus karena hanya fokus untuk menjalankan bisnisnya saja.

Banyak para pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya menerapkan akuntansi, padahal akuntansi merupakan bagian penting untuk menciptakan usaha yang kompeten dan tangguh khususnya untuk posisi keuangan. Semua proses operasional dalam usaha baik arus kas masuk maupun keluar harus dicatat secara terstruktur dan sistematis melalui dukungan bukti transaksi untuk laporan keuangan usaha mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintahan untuk membantu melatih dan membina para pelaku UMKM yang belum menerapkan pengetahuan akuntansi dalam usahanya.

Peran pemerintah sebagai pelatih dan pendidik dalam membina pelaku UMKM sangat dibutuhkan. Dinas koperasi sebagai representasi pemerintah sebaiknya melaksanakan pelatihan dan pendidikan terkait dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya proses pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan, para pelaku usaha dapat semakin memahami urgensi dan proses implementasi akuntansi serta pelaporan keuangan pada usaha mereka. Implikasinya usaha yang sedang mereka jalankan dapat terus berkembang.

Pada lingkup usaha yang sudah besar, penerapan pengetahuan akuntansi menjadi lebih penting lagi, atau bahkan menjadi poin penting yang dan sepatutnya menjadi persyaratan untuk menjadikan usaha tersebut berjalan dengan lancar (Devi & Samujh, 2015; Kim & Im, 2017). Selain bagi pemilik usaha, para pegawainya juga diwajibkan untuk memiliki pengetahuan akuntansi dan harus selalu meng-*upgrade* agar tidak ketinggalan perkembangan dan persaingan perekonomian yang semakin pesat dan tinggi. Lebih lanjut Nihlatul menguraikannya pada kutipan sebagai berikut:

“Pengetahuan akuntansi itu sangat sangat penting, apalagi untuk usaha yang mau berkembang dan ada tujuan untuk menegembangkan lagi usahanya. Karena dengan akuntansi, kondisi keuangan lebih terkontrol kita dapat melihat bagaimana kondisi keuangan usaha kita dan dapat

mengetahui berapa aset yang kita miliki dan berapa beban yang harus kita tanggung, seperti itu” (Nihlatul).

Pengetahuan akuntansi yang mereka tahu hanya sekedar untuk mengetahui untung dan rugi dalam hasil penjualan produksi, atau hanya sebatas yang mereka ketahui saja. Padahal penerapan pengetahuan, *skill* akuntansi, dan pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen, kesadaran, dan dorongan dalam diri pelaku UMKM untuk mempelajari serta mengimplementasikan akuntansi pada usahanya. Kendati demikian, data di lapangan mengisyaratkan banyaknya pemilik UMKM yang minim keinginan belajar dan mengembangkan kemampuan akuntansi dan pengelolaan keuangan, sehingga penerapan akuntansi hanya terbatas pada kemampuan dasar saja.

Sebenarnya, dengan adanya pengetahuan akuntansi yang mudah diterima, para pemilik usaha dapat terbantu untuk menentukan sebuah keputusan ketika di kemudian hari mendapatkan masalah untuk menyelamatkan usaha mereka agar tarafnya tidak serta merata menurun. Jadi, menurut peneliti, pengetahuan akuntansi memang sangat dibutuhkan untuk berbisnis. Kendati dalam penerapannya, pengetahuan akuntansi tidak semudah yang dikira, karena memang terkadang ada orang yang bisa menerapkannya atau bahkan justru tidak bisa menerapkannya.

Dari sudut pandang dosen, penerapan pengetahuan akuntansi tercakup dalam tri dharma pendidikan yang terdiri dari pengabdian, penelitian, dan pengajaran. Seorang dosen tentunya memiliki hak untuk memberikan arahan kepada mahasiswanya tentang pengetahuan akuntansi itu, namun di sisi lain yaitu lingkungan masyarakatnya, pengabdian dikhususkan supaya dapat membantu pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha mikro tersebut dalam penerapan pengetahuan akuntansi khususnya sampai tahap pembuatan laporan keuangan usahanya. Dengan penerapan akuntansi tersebut, pelaku usaha mikro diharapkan dapat memahami dan mengetahui manfaat pengetahuan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Opini dan sudut pandang pelaku UMKM yang masih belum berkembang, khususnya untuk penerapan akuntansi itu sepatutnya perlu diubah dengan melakukan

pembinaan dan pelatihan oleh pihak dinas koperasi. Hal ini diperlukan supaya para pelaku UMKM dapat dengan terbiasa menerapkan pengetahuan akuntansi dalam kegiatan operasional usahanya.

Hal utama yang perlu diketahui oleh calon wirausaha yang akan mendirikan usaha terlebih dahulu adalah kemampuan dan pengetahuan mengenai akuntansi dan pengelolaan keuangan. Basis wawasan akuntansi tersebut meliputi penyusunan laporan keuangan yang merupakan kebutuhan mendesak bagi perusahaan baik yang sudah besar maupun yang masih kecil. Berdasarkan laporan keuangan, kondisi keuangan yang mencakup untung-rugi perusahaan dapat dievaluasi. Mayoritas para pelaku UMKM hanya mengandalkan pengetahuan akuntansi mereka yang terbilang masih sederhana dan belum mencakup standar yang ditetapkan, karena masih belum memahami siklus akuntansi. Hal tersebut disebabkan karena akuntansi merupakan suatu siklus atau proses pengelolaan informasi dari *input* ke *output* berupa informasi akuntansi berbentuk laporan keuangan yang penyusunannya membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mudah diterima.

UMKM yang berjalan dan berkembang memang sudah cukup banyak, namun juga masih banyak dari keseluruhan pelaku UMKM yang belum membuat laporan keuangan usahanya. Pengetahuan akuntansi para pelaku UMKM juga tidak terlalu diterapkan dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini seperti pernyataan Sugeng pada kutipan sebagai berikut:

“Karena pendidikan yang saya miliki masih minim, mungkin karena itu pengetahuan akuntansi saya juga masih minim ya, *Mbak*, jadi untuk menerapkan akuntansi dalam laporan keuangan ya bagaimana jelas tidak maksimal” (Sugeng).

Pernyataan Sugeng menunjukkan adanya anggapan bahwa menyusun laporan keuangan adalah sesuatu yang merepotkan. Mereka enggan untuk membuatnya karena dalam menjalankan usahanya sekarang ini, mereka merasa tidak membutuhkan laporan keuangan dan hanya membutuhkan pembukuan untuk mencatat pengeluaran operasional produksi. Masalah yang kemudian ditimbulkan ialah dari tercampurnya

keuangan bisnis dengan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa pencatatan yang jelas. Mayoritas dari pelaku UMKM tersebut belum memahami akuntansi dan bahkan belum memahami manfaat ketika menyusun laporan keuangan, sehingga berimbas pada munculnya sikap enggan para pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangan. Jenjang pendidikan yang dimiliki para pelaku UMKM juga menjadi faktor, selain faktor keahlian dan warisan yang mempengaruhi pemahaman mengenai penerapan akuntansi dalam membangun sebuah usaha.

Pengabdian, baik oleh pemerintah maupun dosen, dibutuhkan untuk membantu mendampingi para pelaku UMKM dalam memahami pentingnya penerapan akuntansi pada laporan keuangan mereka. Cara yang digunakan dalam menyampaikan tentunya sangat berbeda dengan apa yang disampaikan saat perkuliahan. Penggunaan bahasa yang mudah dicerna akan dapat memudahkan para pelaku UMKM memahami akuntansi. Dimulai dari akuntansi yang paling dasar seperti debet, kredit, akun pembelian, akun pengeluaran, dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan diharapkan para pelaku UMKM tersebut akan lebih terbiasa menggunakan dasar-dasar akuntansi yang telah dipahami untuk menyusun laporan keuangan.

Secara umum, laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu catatan informasi keuangan dalam perusahaan guna mengetahui atau mengukur kinerja perusahaan. Laporan keuangan bersifat urgensi untuk melakukan pinjaman pada lembaga keuangan, misalnya bank atau koperasi, khususnya untuk para pelaku UMKM yang ingin membentuk usahanya atau ingin mengembangkan usahanya (Carey, 2015; Maelah & Yadzid, 2018). Kendati termasuk sederhana, laporan keuangan memang sangat bermanfaat untuk setiap usaha yang dijalankan. Untuk usaha mikro, laporan keuangan memang tidak harus disusun sesuai sistematisa penulisan akuntansi, namun sebaiknya para pelaku UMKM tersebut bersedia untuk menyusun laporan keuangan mereka sendiri meskipun dalam bentuk sederhana. Tidak harus mencakup lima komponen laporan keuangan pada umumnya, yaitu: laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Kebanyakan dari pelaku UMKM terse-

but masih enggan untuk membuat laporan keuangan usahanya menjadi fenomena yang banyak dijumpai peneliti di lapangan. Mereka berasumsi bahwa menyusun laporan terbilang repot dan merepotkan sehingga mereka tidak pasti membuat laporan pada setiap akhir periode. Mereka hanya mencatat secara tidak teratur di lembaran-lembaran dengan tujuan hanya sebagai pengingat.

Saat ini usaha mikro memang menjadi salah satu perhatian pemerintah karena usaha mikro ini cukup memiliki dampak besar bagi pemerintah dan juga bagi kesejahteraan masyarakat. Asumsi itu dinyatakan oleh Mahfud pada kutipan sebagai berikut:

“Untuk pelatihan, khususnya berhubungan dengan laporan keuangan atau biasa kami sebut bimtek keuangan untuk pelaku UMKM merupakan salah satu kegiatan dinas koperasi dan akan ada anggaran tersendiri terkait itu. Mengapa demikian? Karena Operasi perangkat Daerah atau biasa disebut dengan OPD tahun 2016 Diskoperindag dan ISDM, namun per Januari tahun 2017 dinas koperasi sudah terpisah dengan dinas perindustrian dan perdagangan. *Nah*, maka dari itu, anggaran untuk *event* untuk usaha mikro baru ada di tahun 2018 kemarin, sedangkan pada tahun 2017 itu masih belum ada. Kembali lagi berbicara mengenai laporan keuangan. Pihak dinas sudah mengadakan kegiatan sejak Maret 2018 tahun lalu, di mana acara itu memiliki tujuan memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Memang pada saat itu belum menyentuh secara keseluruhan karta keterbatasan anggaran. Kurang lebih saat itu hanya 30-50 UMKM. Itu juga yang diambil yang teridentifikasi di data kami, tapi dari pihak dinas koperasi akan terus berupaya membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya yang berawal dari penataan keuangan dulu” (Mahfud).

Setiap elemen dalam laporan keuangan memiliki pengertian dan fungsi yang akan mempermudah pengklasifikasian jenis laporan keuangan usaha, sekaligus memudahkan

untuk mengetahui aset yang dimiliki, namun pendapat ini belum banyak dipahami oleh para pelaku usaha mikro. Mereka beranggapan bahwa untuk menyusun laporan keuangan secara terpisah akan memperlambat dan mempersulit pekerjaan. Ditambah, mereka juga belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai komponen-komponen laporan keuangan. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk membuat catatan keuangan yang mereka anggap lebih sederhana, bahkan tidak melakukan pencatatan sama sekali meskipun penyusunannya belum dapat benar-benar dipastikan.

Apabila dikaji kembali, maka laporan laba/rugi adalah laporan yang bertujuan untuk memperlihatkan progress atau kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dan untuk mengetahui aset bersih yang didapat dalam satu periode (Ram & Newberry, 2017; Yanto et al., 2017). Laporan tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai penghasilan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi dengan metode ekuitas, pembebasan pajak, dan laba rugi bersih (Kishali et al., 2015; Tsunogaya & Hellmann, 2020). Hal ini sekaligus dapat dilihat posisi pendapatan yang dihasilkan dan pengeluaran yang dikeluarkan mulai dari proses awal hingga akhir. Selisih antara total pendapatan dan besarnya biaya bisa disebut profit/laba (total pendapatan > total biaya) atau rugi (total pendapatan < total biaya). Akan tetapi, hal ini kurang dipahami oleh pihak pengelola UMKM, sehingga mereka tidak melakukan pencatatan atas transaksi keuangan atau pembukuan, dan hanya bergantung pada ingatan temporer dalam melakukan pencatatan. Ingatan berdasarkan memori terkait hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas bisnis seringkali lebih diminati oleh sebagian besar pengusaha UKM. Dari persepsi yang seperti itu, mayoritas para pelaku UMKM enggan untuk membuat laporan keuangan atau khususnya membuat laporan laba/rugi pada usahanya. Terkait dengan laba/rugi dari jumlah produksi produk dalam usaha, Sugeng mengutaikannya pada kutipan berikut ini:

“Untung rugi biasanya saya melihat dari pesanan yang masuk ya, *Mbak*, itu saya bandingkan dengan sebelumnya dan saya bandingkan juga dengan pengeluaran saya untuk setiap pesanan. Kalau

salah perhitungan ya bisa saja rugi. Tapi insyaallah untung” (Sugeng).

Dikarenakan terlalu sering mengandalkan daya ingat dan angan-angan untuk menafsirkan untung atau rugi dalam usaha, serta kurangnya pencatatan, banyak para pelaku UMKM yang lupa besaran hasil yang didapat atau rugi/untung dari usaha mereka pada periode tertentu. Pada hakikatnya, jika para pelaku UMKM berkenan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan laporan keuangan yang berprinsip pada akuntansi dari lima komponen laporan keuangan, misalnya laporan laba/rugi, maka akan banyak kegunaan yang dirasakan secara tidak langsung. Contohnya, jika keuangan bisnis seimbang pada keseluruhan aktivitas bisnis, maka bisa memperoleh keuntungan optimal dengan tetap orientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan demikian, semakin berkembangnya usaha, para pengelolanya juga semakin diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku dengan tujuan agar mereka nantinya semakin piawai dalam membuat laporan keuangan. Banyak sekali pemikiran atau asumsi para pelaku UMKM untuk mengetahui terkait laba/rugi, namun cara yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut sebenarnya tidak dapat dikatakan laba/rugi dalam akuntansi.

Pada tahun 2009, pihak Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melakukan ratifikasi pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Tanggal 1 Januari 2011 menjadi tanggal efektif bagi para usaha yang masuk dalam kategori pengguna SAK ETAP untuk dapat menerapkan standar tersebut pada pelaporan usaha mereka. SAK ETAP dikhususkan bagi para entitas yang tidak memiliki kewajiban akan akuntabilitas publik dengan ciri sebagai berikut. Pertama, entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Kedua, entitas yang menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna eksternal. Biasanya, SAK ETAP digunakan dan diterapkan pada UMKM.

SAK ETAP cenderung mudah untuk dipahami dan tidak rumit ketika dibandingkan dengan SAK Umum (Artini & Sandhi, 2021; Panjaitan et al., 2021). Selain dengan adanya SAK ETAP yang dinilai lebih mudah diaplikasikan, kemudahan lainnya yang diperoleh UMKM ialah dalam hal pem-

bukuan dan pelaporan akuntansi, yakni untuk meningkatnya jumlah dan jenis *software* akuntansi buatan dalam dan luar negeri yang telah dirancang khusus untuk UMKM. Dengan bermunculannya *software* akuntansi, diharapkan UMKM mampu menyusun dan membuat laporan akuntansi lebih mudah dan informatif. Hal tersebut tentu akan berdampak baik bagi UMKM ketika akan mengajukan kredit atau melakukan pengajuan pendanaan pada investor. Kendati demikian, para pelaku UMKM pada kenyataannya masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan laporan keuangan dan cara penggunaan *software* akuntansi

Penyebab dari kurang berkompeterensinya para pelaku UMKM di atas adalah karena pandangan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM masih pada tataran yang sederhana, sehingga belum mampu memahami pentingnya laporan keuangan dan bagaimana proses analisis laporan keuangan tersebut. Padahal, dalam proses analisis tersebut dibutuhkan pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, aktualisasi proses pembukuan menjadi laporan keuangan masih merupakan sesuatu yang rumit dalam sudut pandang para pelaku UMKM. Terlebih ketika didasarkan pada latar belakang pendidikan pengelola dan pelaku UMKM yang kurang mengenal pentingnya akuntansi. Di sisi lain, pelatihan dan pembinaan dari pemerintah masih terbatas. Sedangkan mereka masih belum mampu untuk mempekerjakan ahli akuntan atau tutor yang mengajarkan mereka dalam memahami akuntansi dan menggunakan aplikasi atau *software* pembukuan.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam penerapan SAK ETAP yaitu pemahaman akan SAK ETAP oleh para UMKM itu sendiri. Hal ini seperti jawaban yang diperoleh peneliti dari salah satu informan dalam penelitian ini yang masih belum tahu, bahkan belum pernah mendengar tentang SAK ETAP. Berikut ini adalah jawaban yang diberikan.

“Saya belum pernah mendengar istilah itu, *Mbak*, mungkin jaman saya sekolah dulu masih belum ada ya tentang itu, jadi masih asing untuk saya” (Amri).

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kendala yang dihadapi pelaku atau pemerintah dalam so-

sialisasi standar akuntansi tersebut. Untuk orang awam yang baru mendengar kata SAK ETAP tentunya akan kesulitan, termasuk para pelaku usaha mikro. Tetapi tidak ada salahnya ketika pemerintah ikut berkontribusi langsung dengan turun tangan memberikan sosialisasi terhadap para pelaku usaha mikro secara perlahan dan berkelanjutan. Pada beberapa kondisi mungkin tidak begitu penting bagi pelaku usaha mikro untuk memahami penerapan SAK ETAP karena mengingat usaha yang dijalankan hanya sekadar skala mikro. Sementara itu, sudah dijabarkan bahwa UMKM merupakan salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik, namun belum begitu disadari oleh para pelakunya sendiri. Oleh karena itu, pihak Pemerintah akan tetap berupaya untuk mendampingi, membina, sampai melatih agar para pelaku usaha dapat membuat laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Beberapa peneliti memaparkan bahwa laporan keuangan dibuat dengan sistematis yang memuat posisi keuangan serta transaksi lainnya dalam suatu entitas (Andersén & Samuelsson, 2016; Andrikopoulos & Khorasgani, 2018; Perera & Chand, 2015). Satu benefit dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yaitu menampilkan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Nilai kebermanfaatannya suatu laporan akan meningkat bagi pengguna ketika dapat digunakan sebagai bahan dalam penentuan dan evaluasi keputusan, seperti alokasi sumber daya. Kualitas laporan keuangan memuat aspek-aspek seperti relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, dan dipahami oleh pengguna atau *stakeholder* lainnya.

Kendati laporan keuangan yang dibuat telah relevan dan andal, beberapa permasalahan masih berpotensi muncul. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh tidak mungkin adanya suatu kondisi yang sempurna setiap waktu dalam hal menyajikan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal. Hal tersebut dapat dipicu dengan alasan-alasan kepraktisan lain. Sudah sepatutnya disadari bahwa kebiasaan melakukan pembukuan belum menjadi budaya di Indonesia. Dampaknya, terkadang akan begitu sulit untuk mengetahui posisi perkembangan dan progres usaha. Hanya entitas besar atau *go public* saja yang biasanya telah menerapkan pembuku-

an dan pelaporan yang tertata dengan baik. Bahkan laporan keuangannya sudah terverifikasi dan teraudit baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Seperti pendapat dari Nihlatul selaku salah satu informan kunci peneliti saat ditanyai tentang kendala yang mungkin muncul di kemudian hari ketika para pelaku usaha tersebut tidak menyusun laporan keuangan usaha mereka. Berikut jawaban yang diberikan oleh beliau.

“Akan banyak kendala ya menurut saya, salah satu contoh kendalanya misalnya jika mereka membutuhkan pendanaan sebagai tambahan modal untuk peningkatan jumlah produksinya, nah mereka jelas akan mengajukan pinjaman ke pihak perbankan atau jika itu merupakan pinjaman pertama, maka yang diminta adalah laporan keuangan. Nah sedangkan jika pihak UMKM ini tidak menyusun bahkan tidak memiliki laporan keuangan maka akan menyulitkan pihak UMKM itu sendiri bisa jadi mereka tidak mendapatkan pinjaman yang mereka harapkan. Karena pihak perbankan maupun koperasi jika akan memberikan pinjaman apalagi dengan jumlah besar akan mempertanyakan omsetnya berapa, asetnya bagaimana. Kalau tidak ada laporan atau minimal catatan ‘*kan ya sulit jika hanya mengandalkan perkiraan*’ (Nihlatul).

Pernyataan Nihlatul menunjukkan bahwa dengan melaksanakan dokumentasi, pembukuan, dan pencatatan laporan keuangan yang baik (khususnya pada laporan neraca dan laba/rugi), para pelaku UMKM akan semakin mudah dalam mengetahui posisi usaha apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, hasil laba atau rugi tersebut dapat menjadi dasar rekonsiliasi fiskal dalam menghitung seberapa besar pajak yang akan ditanggung oleh pihak UMKM. Akan tetapi, mayoritas UMKM tidak melakukan pencatatan transaksi secara keseluruhan, sehingga akan mempersulit dalam menentukan laba/rugi dan pajak.

Pencatatan yang tidak menyeluruh tersebut didasarkan pada keengganan UMKM

dalam melakukan pembukuan. Keengganan tersebut disebabkan, pertama, terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Kedua, belum adanya tenaga khusus yang melaksanakan penyusunan pembukuan. Ketiga, penggunaan dan pengelolaan keuangan yang kurang terkontrol dan bahkan belum ada pemisahan antara penggunaan uang untuk usaha dengan kegiatan sehari-hari. Keempat, adanya perasaan dan stigma bahwa akuntansi merupakan hal yang merepotkan. Kelima, adanya biaya tambahan ketika melakukan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Kendala dan permasalahan tersebut membuat para pelaku UMKM enggan menyajikan laporan keuangan.

Pada masa ini, laporan keuangan menjadi suatu instrumen krusial agar bisnis beroperasi dengan baik dan memiliki *sustainability*. Apabila terjadi ketidakstabilan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, maka dapat memberikan dampak negatif pada usaha yang justru akan merugikan pihak pemilik usaha. Pada dasarnya, laporan keuangan memang digunakan oleh pihak tertentu saja seperti pengelola usaha dan pihak kreditur, namun seiring dengan perkembangan zaman, laporan keuangan menjadi hal yang krusial bagi pihak *stakeholder* lainnya. Meskipun laporan keuangan menjadi instrumen yang dinilai krusial dalam sebuah usaha, masih saja banyak pelaku usaha yang mengabaikannya. Mereka beranggapan bahwa laporan keuangan tidak akan ada berpengaruh secara signifikan dalam usaha yang dijalankan. Kebanyakan pelaku UMKM memilih pengajuan pinjaman untuk tambahan modal usahanya pada entitas yang memberikan syarat pinjaman tidak yang dianggap tidak ribet atau merepotkan. Hal ini nampak dari jawaban Sundari, ketika peneliti bertanya terkait fungsi laporan keuangan bagi peningkatan minat investasi modal pada usaha yang dijelankannya. Berikut ini adalah jawaban yang diberikan:

“Sebenarnya laporan keuangan itu berpengaruh ya terhadap keberlangsungan usaha, mungkin saat ini pelaku UMKM belum menyadari hal itu. Laporan keuangan juga dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman modal, bahkan pihak perbankan sebenarnya menjadikan laporan keuangan se-

bagai salah satu prasyarat untuk pengajuan pinjaman dana untuk modal usaha, karena dari laporan keuangan pihak perbankan akan menilai bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM, laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak perbankan untuk mengambil keputusan apakah pengajuan ini disetujui atau tidak kan begitu. Jika tidak dengan laporan keuangan dampaknya para investor atau dalam hal ini peminjam modal akan merasa enggan karena tidak ada bahan pertimbangan bagi mereka untuk menginvestasikan dananya pada usaha tersebut. Meskipun banyak juga yang oknum-oknum yang mempermudah pinjaman namun dengan jaminan, tapi itu sebenarnya bukan jalan yang sehat. Maka dari itu, untuk meminimalisir masalah ini pihak pemerintah khususnya dinas koperasi akan terus memberikan pembinaan serta pelatihan untuk pelaku usaha mikro agar menyusun laporan keuangannya, dimana saat ini di dinas koperasi ada yang namanya klinik UKM yang berguna untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya” (Sundari).

Pernyataan Sundari menunjukkan bahwa laporan keuangan berguna untuk merangkum dan mencatat seluruh transaksi keuangan dalam sebuah usaha pada periode tertentu. Laporan keuangan dapat dikatakan sesuai ketika memenuhi standar yang telah ditentukan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa dikenal dengan sebutan PSAK. Dalam standar tersebut, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik, yaitu dapat dipahami oleh setiap pihak, relevan dengan kondisi perusahaan, memiliki keterandalan dengan informasi yang sesuai, dan dapat dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya. Untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau dalam hal ini seperti UMKM, penyusunan laporan keuangan perlu didasarkan dan berpedoman pada SAK ETAP. Dengan adanya standar tersebut, UMKM diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah di-

tentukan agar dapat mendorong usahanya menuju usaha yang lebih berkembang dan dapat memudahkan pihak eksternal dalam hal ini investor untuk menginvestasikan dananya untuk membantu modal usaha yang dijalankan para pelaku UMKM (Girella et al., 2019). Sinergi antara pelaku UMKM dengan para pihak lain diperlukan untuk mengembangkan beragam usaha yang dijalankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Gassen, 2017; Huguet & Gandia, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa sikap yang ditunjukkan sebagian besar pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan yaitu tergolong sikap skeptisisme. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa skeptisisme bermakna pandangan mengenai ketidakpercayaan seseorang terhadap sesuatu hal yang belum pasti kebenarannya. Sangat disayangkan ketika para pelaku UMKM bersikap skeptis terhadap penyusunan laporan keuangan, karena hal tersebut merupakan instrumen yang penting dalam sebuah usaha dan dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengevaluasi sebuah hasil kerja pada usaha yang dijalankan.

Arafat et al. (2020) dan Vigneron & Mard (2016) mendukung bahwa laporan keuangan sangat berpengaruh dan memberikan dampak signifikan pada manajemen. Laporan keuangan bisa menjadi barometer perkembangan usaha serta memberikan kondisi keuangan suatu entitas. Akan tetapi, adanya sikap skeptisisme ini justru akan merugikan pelaku UMKM sendiri karena akan berpengaruh terhadap usahanya, terutama pada peningkatan minat investasi modal. Adapun skeptisisme yang dimiliki UMKM tersebut masih tergolong nisbi atau tidak meragukan segalanya secara komprehensif, karena dilandasi akan adanya salah pemahaman terkait suatu hal atau informasi, seperti halnya ketika para pelaku UMKM menganggap laporan keuangan hanya secara sebelah mata, padahal laporan keuangan sendiri akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha mereka.

Sikap skeptisisme dari para pelaku UMKM ini dapat terlihat dari keengganan mereka dalam menyusun laporan keuangan, yang disebabkan oleh faktor tingkat pemahaman akuntansi yang minim, latar belakang pendidikan yang kurang sesuai, dan kurangnya kompetensi SDM dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian juga karena mereka belum memahami ur-

gensi dan adanya peraturan akuntansi yang berlaku, serta sebagian besar dari mereka merasa kerepotan ketika diharuskan untuk menyusun laporan keuangan usahanya. Sementara mereka juga beranggapan bahwa selama mereka menjalani usaha mereka tanpa laporan keuangan, usaha mereka tetap berjalan dan tetap memberikan keuntungan. Salah satu faktor yang cukup menarik ialah karena sebagian besar dari mereka menggabungkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga yang semakin mempersulit pengklasifikasian untung/rugi dalam usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa tidak akan mungkin untuk menyusun laporan keuangan sebab tidak akan sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, laporan keuangan menjadi unsur yang krusial bagi para pelaku usaha. Hal ini seperti diutarakan oleh Nihlatul pada pernyataan sebelumnya bahwa laporan keuangan sangat memiliki peran penting untuk masa depan, karena dengan adanya laporan keuangan akuntansi, pertumbuhan usaha yang dijalankan dapat dipantau. Hal itu menjadi dasar dalam pentingnya menyusun laporan keuangan meskipun tidak secara sistematis menurut akuntansi. Seperti yang sering dijumpai dalam penelitian ini bahwa memang masih banyak para pelaku UMKM terlebih usaha mikro yang tidak begitu menggubris laporan keuangan usaha mereka karena beranggapan bahwa tanpa menyusun laporan keuangan pun usaha mereka masih tetap berjalan dan kebutuhan akan laporan keuangan tidak perlu secara rutin dilakukan.

Salah satu informan kunci pada penelitian ini (Sundari) juga mengutarakan bahwa terdapat kendala-kendala yang seringkali ditemukan selama mempersiapkan laporan keuangan, contohnya jika mereka membutuhkan pendanaan bantuan modal untuk meningkatkan kuantitas produksinya. Dia akan secara otomatis membutuhkan biaya atau pinjaman, dan ketika memilih untuk melakukan mengajukan ke perbankan atau pinjaman, yang pertama pihak perbankan minta adalah laporan keuangan. Jika dari pihak UMKM tidak dapat menunjukkan pencatatan atau laporan keuangan usahanya, maka secara otomatis tidak dapat melakukan pengajuan pinjaman pada bank atau koperasi, terlebih untuk pengajuan pinjam-

an dengan jumlah yang besar, tentunya pihak pemberi pinjaman akan bertanya terkait dengan besaran omset dan assetnya yang dimiliki. Jika tidak memiliki laporan keuangan atau minimal catatan usaha, maka mereka akan kesulitan karena hanya mengandalkan perkiraan. Hal ini seperti temuan Cosenz & Noto (2015) dan Riva & Salotti (2015) yang menyatakan bahwa manfaat dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan meningkatkan kemudahan serta aksesibilitas investor guna memberikan bantuan pendanaan atau pembiayaan bagi perkembangan UMKM.

Para informan pada penelitian ini merupakan pelaku usaha mikro yang sebagian kecil sudah dianggap melakukan pencatatan keuangan walaupun hanya secara sederhana dan hanya sebatas yang diketahui untuk sekadar ingin mengetahui laba-rugi dari usahanya. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Artini & Sandhi (2021) dan Panjaitan et al. (2021) bahwa para pelaku UMKM membuat laporan keuangannya hanya untuk mengetahui laba/rugi perusahaan pelaku usaha mikro, dan sesuai dengan temuan Cherry (2016) dan Palazuelos et al. (2018) yang mengatakan bahwa sebagian besar UMKM telah mencatat kegiatan atau aktivitas usaha seperti penjualan, pembelian, biaya gaji, dan pengeluaran biaya lainnya. Selanjutnya mereka melakukan pembuatan laporan berupa laporan penjualan, pembelian, penggajian, dan pembelian saja. Di sisi lain, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Ahmad & Zabri (2015) dan Marina (2021) yang menemukan bahwa UMKM belum membutuhkan informasi akuntansi karena masih kesulitan dalam melakukan pencatatan akuntansi dan banyak keterbatasan dalam melaksanakannya. Bahkan proses akuntansi dianggap sebagai aktivitas yang hanya menguras waktu dan biaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Corazza (2017) dan Perera et al. (2020) bahwa mayoritas pelaku UMKM hanya melaksanakan pencatatan pada jumlah kas dan barang keluar-masuk, serta jumlah piutang atau hutang yang ditanggungnya. Namun pencatatan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi, khususnya pada SAK ETAP sehingga sulit untuk digunakan sebagai landasan pembuatan laporan keuangan yang sesuai. Adapun, untuk mempekerjakan akuntan tentu membutuh-

kan biaya yang besar dan hal tersebut akan menjadi masalah bagi UMKM. Padahal laporan keuangan yang dibuat memiliki maksud dan tujuan yang merepresentasikan tujuan dari entitas tersebut (Bonito & Pais, 2018; Kim & Yasuda., 2019; López & Hiebl, 2015). Bagian-bagian dari laporan keuangan memiliki makna untuk menggambarkan kondisi usaha, baik secara kecil maupun besar. Dengan demikian, penting untuk menerapkan standarisasi pencatatan dan pelaporan agar pengguna laporan keuangan, baik eksternal maupun internal, agar dapat memahami laporan tersebut. Pada kenyatannya, memang masih banyak para pelaku UMKM yang belum dijadikan informan pada penelitian ini yang masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan keuangan usahanya. Sehingga sebagian besar dari mereka membuat pencatatan tidak secara rutin namun menyesuaikan niat membuatnya dengan alasan biaya dan waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan baik oleh perseorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya merupakan gambaran singkat dari investasi. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan roda perekonomian, senada dengan penelitian Arafat et al. (2020) dan Liu & Skerratt (2018) yang menemukan bahwa pembangunan ekonomi yang melibatkan pihak eksternal secara penanaman modal baik pihak luar maupun pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan tingkat penanaman modal. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan capaian yang diharapkan, maka diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi pula.

Seluruh informan kunci dalam penelitian ini juga sepakat untuk mengakui bahwa investor sebenarnya sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, dalam hal ini sebagai jembatan penyambung ketika pelaku usaha membutuhkan tambahan dana modal untuk memperluas dan mengembangkan usaha yang tengah digeluti, tak terkecuali bagi pelaku UMKM. Akan tetapi, persepsi para pelaku UMKM untuk tidak menyusun laporan keuangan lebih kuat ketika dibandingkan dengan dorongan akan manfaat yang akan diperoleh (Achadiyah, 2019; Albu & Albu, 2017; Kvaal, 2017).

Jika dihubungkan dengan hasil riset Bartolini et al. (2014) dan Damak-Ayadi et

al. (2020), penulis menarik benang merah bahwa sebagian besar UMKM tidak memiliki kepentingan untuk memantapkan laporan keuangan, sebab mereka jarang menjalin hubungan dengan orang-orang atau organisasi yang berkaitan dengan usahanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka tidak menyusun laporan keuangan dengan salah satu alasannya adalah karena saat ini mereka tidak merasa membutuhkan dan merasa tidak memiliki kepentingan dengan pihak lain yang membutuhkan laporan keuangan.

Investor atau dalam hal ini pihak kreditor memiliki kepentingan dengan laporan keuangan usaha yang mereka berikan kredit atau pinjaman. Tentunya pihak perbankan sebagai salah satu intitusi kreditor ingin menjamin keamanan kredit yang akan dikeluarkan. Pihak perbankan akan memeriksa terkait profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas pelaku usaha sebelum kredit disetujui untuk dicairkan (Samuelson et al., 2016; Warren et al., 2020). Dengan tidak terpenuhinya hal tersebut, muncul dampak pada minat investasi modal bagi para pelaku usaha karena pihak investor atau kreditor akan menganggap bahwa keuangan yang mereka miliki masih belum bisa dipertanggung jawabkan dan jaminan keamanan kredit akan semakin kecil. Pelaku UMKM memerlukan kegiatan-kegiatan yang diusung untuk memberikan pelatihan, pembinaan, serta pendampingan kepada para pelaku usaha dalam rangka membuat laporan keuangan berdasarkan standar agar dapat meningkatkan minat investasi modal bagi usaha mereka (Ngoma et al., 2017; Palazuelos et al., 2020).

Sikap enggan dan skeptis para pelaku usaha dalam membua laporan keuangan membuat minat dari investor maupun kreditor untuk memberikan investasi modal menurun. Padahal modal sebagai sumber pembiayaan merupakan elemen yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk lebih mengembangkan usahanya dan membantu usahanya agar terus tumbuh. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Binh et al. (2020) dan Pedroso & Gomes (2020) yang menyatakan bahwa perlunya peningkatan sumber pembiayaan terhadap akses UMKM, karena memang begitu penting peran modal dalam sebuah usaha. Para informan juga menyatakan bahwa mereka memang sangat membutuhkan bantuan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, namun keingin-

an tersebut tidak diiringi dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hasil riset ini tidak sama dengan Artini & Sandhi (2021) dan Panjaitan et al. (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah kredit yang diterima oleh UMKM dengan kualitas laporan keuangan UMKM, sehingga hal tersebut memunculkan keraguan terhadap keterkaitan dan keterandalan laporan keuangan oleh pihak eksternal sebagai pemberi dana. Padahal di lapangan, peneliti menemukan bahwa laporan keuangan sangat berhubungan dengan pembiayaan, karena laporan keuangan merupakan salah satu instrumen usaha yang mencerminkan akuntabilitas sebuah usaha.

SIMPULAN

Sebagian besar pelaku UMKM merasa enggan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan bagi usaha mereka sendiri. Sejauh ini mereka hanya melakukan pencatatan secara sederhana, itu pun pada saat kondisi-kondisi tertentu dan tanpa menerapkan standar akuntansi yang berlaku (khususnya SAK ETAP). Pencatatan yang mereka buat hanya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa mengklasifikasikannya ke bentuk laporan keuangan yang seharusnya, seperti yang memuat neraca, laba/rugi, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Harusnya para pelaku UMKM melakukan pencatatan sesuai dengan pedoman yang berlaku, karena akan dapat membantu ketika mereka membutuhkan pendanaan bantuan modal. Pihak dinas koperasi harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang laporan keuangan ataupun SAK ETAP seperti dengan memberikan pelatihan, pembinaan, serta pendampingan kepada para pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat diharapkan untuk memahami dan mengimplementasikan proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai guna meningkatkan tingkat akuntabilitas dan mendorong minat investasi modal bagi usaha mereka. Kemudian perlu juga untuk menghilangkan sikap enggan dan skeptis para pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel.

DAFTAR RUJUKAN

- Abe, M., Troilo, M., & Batsaikhan, O. (2015). Financing Small and Medium Enterprises in Asia and the Pacific. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 4(1), 2-32. <https://doi.org/10.1108/JEPP-07-2012-0036>
- Achadiyah, B. N. (2019). Otomatisasi Pencatatan Akuntansi pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 188-206. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10011>
- Ahmad, K., & Zabri, S. M. (2015). Factors Explaining the Use of Management Accounting Practices in Malaysian Medium-Sized Firms. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 22(4), 762-781. <https://doi.org/10.1108/JSBED-04-2012-0057>
- Albu, C. N., & Albu, N. (2017) The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from Romania. *Accounting in Europe*, 14(1-2), 177-186. <https://doi.org/10.1080/17449480.2017.1301668>
- Andersén, J., & Samuelsson, J. (2016). Resource Organization and Firm Performance: How Entrepreneurial Orientation and Management Accounting Influence the Profitability of Growing and Non-Growing SMEs. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 22(4), 466-484. <https://doi.org/10.1108/IJEER-11-2015-0250>
- Andrikopoulos, P., & Khorasgani, A. (2018). Predicting Unlisted SMEs' Default: Incorporating Market Information on Accounting-Based Models for Improved Accuracy. *British Accounting Review*, 50(5), 559-573. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.02.003>
- Arafat, I., Dunne, T., & Ahmed, A. H. (2020). Splitting Accountability Hairs: Anomalies in the Adaptation of IFRS for SMEs in the UK and Ireland. *Accounting in Europe*, 17(2), 183-203. <https://doi.org/10.1080/17449480.2020.1764601>
- Artini, L. G. S., & Sandhi, N. L. P. S. (2021). Comparison of SME Stock Portfolio and Manufacturing Company Performance in the Indonesian, Indian and Chinese Stock Markets. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 37(2), 209-237. <https://doi.org/10.1108/JEAS-04-2019-0044>

- Armitage, H. M., Webb, A., & Glynn, J. (2016). The Use of Management Accounting Techniques by Small and Medium-Sized Enterprises: A Field Study of Canadian and Australian Practice. *Accounting Perspectives*, 15(1), 31-69. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12089>
- Azudin, A., & Mansor, N. (2018). Management Accounting Practices of SMEs: The Impact of Organizational DNA, Business Potential and Operational Technology. *Asia Pacific Management Review*, 23(3), 222-226. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.07.014>
- Bartolini, M., Gardini, S., & Savioli, G. (2014). International Financial Reporting Standards and SMEs: The Effects on Firm Rating According to Basel II. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 10(1), 43-67. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2014.059182>
- Bautista-Mesa, R., Muñoz-Tomás, J. M., & Horno-Bueno, M. P. (2019). Does the IASB Know the Needs of SMEs? A Comparative Analysis between the IFRS for SMEs and Full IFRS Due Processes. *Spanish Accounting Review*, 22(2), 203-217. <https://doi.org/10.6018/rcsar.382261>
- Bauwhede, H. V., Meyere, M. D., & Cauwenberge, P. V. (2015). Financial Reporting Quality and the Cost of Debt of SMEs. *Small Business Economics*, 45(1), 149-164. <https://doi.org/10.1007/s11187-015-9645-1>
- Binh, V. T. T., Tran, N., Thanh, D. M., & Nga, N. T. H. (2020). Impact of Accountant Resource on Quality of Accounting Information System: Evidence from Vietnamese Small and Medium Enterprises. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 9(1), 1-14. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2020.9.1.001>
- Bonito, A., & Pais, C. (2018). The Macroeconomic Determinants of the Adoption of IFRS for SMEs. *Spanish Accounting Review*, 21(2), 116-127. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2018.03.001>
- Cahyaningtyas, F., & Ningtyas, M. N. (2020). Akuntan Outsourcing dan Kinerja UMKM: Perspektif Resource Based View. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 167-182. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.004>
- Carey, P. J. (2015). External Accountants' Business Advice and SME Performance. *Pacific Accounting Review*, 27(2), 166-188. <https://doi.org/10.1108/PAR-04-2013-0020>
- Cherry, M. (2016). Accounting for Trust: A Conceptual Model for the Determinants of Trust in the Australian Public Accountant – SME Client Relationship. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 10(2), 3-22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v10i2.2>
- Coetzee, F., & Boys, P. W. (2017). SME Perceptions of the Independent Review and Accounting Skills on Bank Financing: South African Perspective. *Banks and Bank Systems*, 12(2), 51-59. [https://doi.org/10.21511/bbs.12\(2\).2017.05](https://doi.org/10.21511/bbs.12(2).2017.05)
- Coram, P. J. (2018). Discussion of: Accounting Practitioners' Attitudes toward Accounting Harmonization: Adoption of IFRS for SMEs in Italy. *Journal of International Accounting Research*, 17(2), 123-126. <https://doi.org/10.2308/jiar-10630>
- Corazza, L. (2017). The Standardization of Down-Streamed Small Business Social Responsibility (SBSR): SMEs and Their Sustainability Reporting Practices. *Information Resources Management Journal*, 30(4), 39-52. <https://doi.org/10.4018/IRMJ.2017100103>
- Cosenz, F., & Noto, L. (2015). Combining System Dynamics Modelling and Management Control Systems to Support Strategic Learning Processes in SMEs: A Dynamic Performance Management Approach. *Journal of Management Control*, 26(2-3), 225-248. <https://doi.org/10.1007/s00187-015-0208-z>
- Cultrera, L., & Brédart, X. (2016). Bankruptcy Prediction: The Case of Belgian SMEs. *Review of Accounting and Finance*, 15(1), 101-119. <https://doi.org/10.1108/RAF-06-2014-0059>
- Damak-Ayadi, S., Sassi, N., & Bahri, M. (2020). Cross-Country Determinants of IFRS for SMEs Adoption. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(1), 147-168. <https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2018-0118>
- Devi, S. S., & Samujh, R. H. (2015). The Political Economy of Convergence: The Case of IFRS for SMEs. *Australian Accounting Review*, 25(2), 124-138. <https://doi.org/10.1111/auar.12048>

- Gassen, J. (2017). The Effect of IFRS for SMEs on the Financial Reporting Environment of Private Firms: An Exploratory Interview Study. *Accounting and Business Research*, 47(5), 540-563. <https://doi.org/10.1080/00014788.2017.1314105>
- Girella, L., Zambon, S., & Rossi, P. (2019). Reporting on Sustainable Development: A Comparison of Three Italian Small and Medium-Sized Enterprises. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 981-996. <https://doi.org/10.1002/csr.1738>
- Fera, P., & Salzillo, G. (2021). Earnings Quality and the Cost of Debt for SMEs under Severe Information Asymmetry. *Journal of Governance and Regulation*, 10(3), 128-139. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I3ART11>
- Handley, K., Wright, S., & Evans, E. (2018). SME Reporting in Australia: Where to Now for Decision-Usefulness? *Australian Accounting Review*, 28(2), 251-265. <https://doi.org/10.1111/auar.12179>
- Huguet, D., & Gandía, J. L. (2016). Audit and Earnings Management in Spanish SMEs. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(3), 171-187. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.12.001>
- Kalkhouran, A. A. N., Rasid, S. Z. A., Sofian, S., & Nedaei, B. H. N. (2015). A Conceptual Framework for Assessing the Use of Strategic Management Accounting in Small and Medium Enterprises. *Global Business and Organizational Excellence*, 35(1), 45-54. <https://doi.org/10.1002/joe.21644>
- Kaya, D., & Koch, M. (2015). Countries' Adoption of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) – Early Empirical Evidence. *Accounting and Business Research*, 45(1), 93-120. <https://doi.org/10.1080/00014788.2014.969188>
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The Study on the Effect and Determinants of Small and Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375-390. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i2.9911>
- Kim, J. H., & Yasuda, Y. (2019). Accounting Information Quality and Guaranteed Loans: Evidence from Japanese SMEs. *Small Business Economics*, 53(4), 1033-1050. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0106-5>
- Kishali, Y., Sharma, H., & Mitchem, C. (2015). An Analysis of IFRS for SMEs from the Accountants' Perspectives: Evidence from Turkey. *Journal of International Business and Economics*, 15(1), 17-29. <https://doi.org/10.18374/JIBE-15-1.2>
- Kvaal, E. (2017). The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from Norway. *Accounting in Europe*, 14(1-2), 150-157. <https://doi.org/10.1080/17449480.2017.1304646>
- Laureano, R. M. D. S., Machado, M. J. C. V., & Laureano, L. M. D. S., (2016). Maturity in Management Accounting: Exploratory Study in Portuguese SME. *Society and Economy*, 38(2), 139-156. <https://doi.org/10.1556/204.2016.38.2.1>
- Lindawati, A. S. L. (2014). A Study of Collective Entrepreneurship Model as an Alternative in Empowering Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Cooperatives. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 17(2), 171-186. <https://doi.org/10.14414/jebav.v17i2.301>
- Liu, S., & Skerratt, L. (2018). Earnings Quality Across Different Reporting Regimes: Listed, Large Private, Medium-Sized, Small and Micro Companies in the UK. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(1), 2-19. <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2015-0009>
- López, O. L., & Hiebl, M. R. W. (2015). Management Accounting in Small and Medium-Sized Enterprises: Current Knowledge and Avenues for Further Research. *Journal of Management Accounting Research*, 27(1), 81-119. <https://doi.org/10.2308/jmar-50915>
- Maelah, R., & Yazid, N. H. N. (2018). Budgetary Control, Corporate Culture and Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. *International Journal of Globalisation and Small Business*, 10(1), 77-99. <https://doi.org/10.1504/IJGSB.2018.091831>
- Marina, A. (2021). Perspectives of Different Stakeholder Groups about the Alignment of IFRS for SMEs with IFRS Stan-

- dard. *Studies in Business and Economics*, 16(3), 109-122. <https://doi.org/10.2478/sbe-2021-0048>
- Narsa, N. P. D. R. H. (2017). SAK-ETAP sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 44-65. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i1.21>
- Nassar, M., Nimer, K., & Islam, A. R. M. (2020). The Suitability of the Small and Medium-Sized Enterprises in Dubai to the Requirements of International Financial Reporting Standards. *International Journal of Economics and Business Research*, 20(1), 41-58. <https://doi.org/10.1504/IJEER.2020.108503>
- Niswatin, Noholo, S., Tuli, H., & Wuryandini, A. R. (2017). Perilaku Pengusaha Mikro Betawi Perantauan terhadap Cost Reduction. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 427-443. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7064>
- Ngoma, M., Ernest, A., Nangoli, S., & Christopher, K. (2017). Internationalisation of SMEs: Does Entrepreneurial Orientation Matter? *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 13(2), 96-113. <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-08-2016-0039>
- Palazuelos, E., Crespo, Á. H., & Corte, J. M. D. (2018). Effect of Perceived Default Risk and Accounting Information Quality on the Decision to Grant Credit to SMEs. *Risk Management*, 20(2), 121-141. <https://doi.org/10.1057/s41283-017-0030-z>
- Palazuelos, E., Crespo, Á. H., & Corte, J. M. D. (2020). Auditing and Credit Granting to SMEs: An Integrative Perceptual Model. *Managerial Auditing Journal*, 35(1), 152-174. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2118>
- Panjaitan, J. M., Timur, R. P., & Sumiyana, S. (2021). How Does the Government of Indonesia Empower SMEs? An Analysis of the Social Cognition Found in Newspapers. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 13(5), 765-790. <https://doi.org/10.1108/JEEE-04-2020-0087>
- Pedroso, E., & Gomes, C. F. (2020). The Effectiveness of Management Accounting Systems in SMEs: A Multidimensional Measurement Approach. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(3), 497-515. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2018-0059>
- Perera, D., & Chand, P. (2015). Issues in the Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium-Sized Enterprises (SMES). *Advances in Accounting*, 31(1), 165-178. <https://doi.org/10.1016/j.adiaac.2015.03.012>
- Perera, D., Chand, P., & Mala, R. (2020). Confirmation Bias in Accounting Judgments: The Case for International Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Enterprises. *Accounting and Finance*, 60(4), 4093-4119. <https://doi.org/10.1111/acfi.12523>
- Pradhan, J. P., & Das, K. (2015). Regional Export Advantage of Rising Power SMEs: Analytics and Determinants in the Indian Context. *Critical Perspectives on International Business*, 11(3/4), 236-258. <https://doi.org/10.1108/cpoib-10-2013-0040>
- Qamruzzaman, M., & Jianguo, W. (2019). SME Financing Innovation and SME Development in Bangladesh: An Application of ARDL. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 31(6), 521-545. <https://doi.org/10.1080/08276331.2018.1468975>
- Ram, R., & Newberry, S. (2017). Agenda Entrance Complexity in International Accounting Standard Setting: The Case of IFRS for SMEs. *Abacus*, 53(4), 485-512. <https://doi.org/10.1111/abac.12122>
- Rickards, R. C., & Ritsert, R. (2018). Organisational Influences on Management Accounting Toolkits in Chinese Enterprises: An Exploratory Study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 10(1), 16-31. <https://doi.org/10.1504/IJMFA.2018.091072>
- Ritchi, H., Azis, Y., Adrianto, Z., Setiono, K., & Sanjaya, S. (2020). In-App Controls for Small Business Accounting Information System: A Study of Domain Understanding. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 27(1), 31-51. <https://doi.org/10.1108/JSBED-12-2018-0372>
- Riva, E. D., & Salotti, B. M. (2015). Adoption of the International Accounting Standard by Small and Medium-Sized Entities and Its Effects on Credit Granting. *Revista Contabilidade e Fi-*

- nancas, 26(69), 304-316. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201512270>
- Saeidi, S. P., Othman, M. S. H., Saeidi, P., & Saeidi, S. P. (2018). The Moderating Role of Environmental Management Innovation and Firm Financial Performance. *International Journal of Business Performance Management*, 19(3), 326-348. <https://doi.org/10.1504/IJBPM.2018.092759>
- Samuelsson, J., Andersén, J., Ljungkvist, T., & Jansson, C. (2016). Formal Accounting Planning in SMEs: The Influence of Family Ownership and Entrepreneurial Orientation. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 23(3), 691-702. <https://doi.org/10.1108/JSBED-12-2015-0167>
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2021). Financial Reporting Incentives, Earnings Management, and Tax Avoidance in SMEs. *Journal of Business Finance and Accounting*, 48(7-8), 1404-1433. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12519>
- Sari, D. P. (2013). Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 188-197. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7192>
- Schans, D. V. D. (2015). The British Business Bank's Role in Facilitating Economic Growth by Addressing Imperfections in SME Finance Markets. *Venture Capital*, 17(1-2), 7-25. <https://doi.org/10.1080/13691066.2015.1021026>
- Sharma, U., & An, Y. (2018). Accounting and Accountability in Fiji: A Review and Synthesis. *Australian Accounting Review*, 28(3), 421-427. <https://doi.org/10.1111/auar.12197>
- Tsunogaya, N., & Hellmann, A. (2020). Using Arguments and Myths to Lobby Over Controversial Accounting Issues: Evidence from Japan. *Pacific Accounting Review*, 32(3), 355-390. <https://doi.org/10.1108/PAR-01-2019-0003>
- Vigneron, L., & Mard, Y. (2016). Earnings Management Across Publicly Traded and Privately Held French SMEs. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 29(3), 416-440. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2016.079418>
- Warren, R., Carter, D. B., & Napier, C. J. (2020). Opening up the Politics of Standard Setting through Discourse Theory: The case of IFRS for SMEs. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(1), 124-151. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2018-3464>
- Williams, B. R., & O'Donovan, G. (2015). The Accountants' Perspective on Sustainable Business Practices in SMEs. *Social Responsibility Journal*, 11(3), 641-656. <https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2014-0096>
- Yanto, H., Yulianto, A., Sebayang, L. K. B., & Mulyaga, F. (2017). Improving the Compliance with Accounting Standards without Public Accountability (SAK ETAP) by Developing Organizational Culture: A Case of Indonesian SMEs. *Journal of Applied Business Research*, 33(5), 929-940. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i5.10016>